



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR : 188.42 / 07 / 2019

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas penyusunan dan pembahasan serta meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam perkembangannya, Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Blora Nomor : 188.42/41/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019, perlu dicabut dan disesuaikan;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);

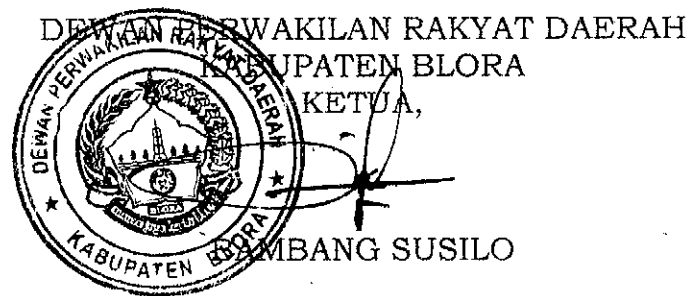
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Blora Nomor : 188.42/0517 tanggal 15 Februari 2019 perihal Usulan Perubahan Program Pembentukan Perda Tahun 2019;
 2. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tanggal 26 Maret 2019;
 3. Hasil Musyawarah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tanggal 4 April 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan instrumen program dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora dalam Tahun 2019.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019,
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan DPRD Kabupaten Blora Nomor : 188.42/41/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 4 April 2019



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada YTH :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Blora.

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 TAHUN 2019**

A. Ranperda Umum

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
1.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Regulasi mengenai tata kelola dan penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik	V		DPRD	
2.	Keterbukaan Informasi Publik	Regulasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik	V		DPRD	
3.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Regulasi dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 8 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	V		DPRD	
4.	Distribusi Barang-barang Bersubsidi	Regulasi mengenai tata kelola dan penyelenggaraan distribusi barang-barang bersubsidi untuk menjamin kualitas, efektivitas, efisiensi, kelancaran dan ketepatan sasaran penerima barang-barang bersubsidi	V		DPRD	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
5.	Pelestarian Cagar Budaya	Regulasi untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya yang meliputi benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya	V		DPRD	
6.	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Narkotika di Kabupaten Blora	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan bahaya Narkotika di Kabupaten Blora, meliputi: pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan/atau peredaran Narkotika - Pemberian perlindungan sosial terhadap korban penyalahgunaan dan/atau peredaran Narkotika berupa bantuan sosial, bantuan hukum dan advokasi sosial - Hak, kewajiban dan larangan bagi korban penyalahgunaan dan/atau peredaran Narkotika, masyarakat dan Pemerintah Daerah 	V		DPRD	
7.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Regulasi mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	V		DPRD	
8.	Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Blora	Regulasi mengenai tata kelola dan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Blora dalam rangka memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan	V		PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
9.	Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Blora	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Blora, meliputi: pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penderita HIV/AIDS - Pemberian perlindungan sosial terhadap ODHA berupa bantuan sosial, bantuan hukum dan advokasi sosial - Hak, kewajiban dan larangan bagi ODHA, masyarakat dan Pemerintah Daerah 	V		PEMKAB	
10.	Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Pasal 37 mengenai tarif pajak Minerba sebesar 25% menjadi 10% - Penambahan objek pajak berupa hiburan agro wisata 		V	PEMKAB	
11.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah	Perubahan Pasal 7 mengenai tarif pajak air tanah sebesar 20% menjadi 10%		V	PEMKAB	
12.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Penambahan ketentuan mengenai denda dan jangka waktu pengenaan denda		V	PEMKAB	
13.	Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Penambahan klausula yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Bupati yang mengatur lebih lanjut mengenai Nilai Pasar sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		V	PEMKAB	
14.	Sistem <i>Online</i> Pajak Daerah	Penyelenggaraan Sistem <i>Online</i> dalam pemungutan pajak Daerah	V		PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
15.	Perubahan Atas Perda Kab. Blera Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blera	<p>Pemecahan perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perda Kab. Blera Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blera yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirumkimhub, menjadi 2 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan dan Permukiman - Dinas Perhubungan 2. Dinsos P3A, menjadi 2 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 		V	PEMKAB	
16.	Perubahan Atas Perda Kab. Blera Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blera pada BUMD Kabupaten Blera dan BUMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021	Perubahan Penyertaan Modal		V	PEMKAB	
17.	Perusahaan Umum Daerah Wira Usaha	Perubahan nomenklatur dan ketentuan sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD terhadap Perda Kab. Blera Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wira Usaha		V	PEMKAB	
18.	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora"	Perubahan nomenklatur dan ketentuan sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD terhadap Perda Kab. Blera Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora"		V	PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
19.	Perusahaan Perseroan Daerah Blora Patragas Hulu	Perubahan nomenklatur dan ketentuan sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD terhadap Perda Kab. Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian PT. BLORA PATRAGAS HULU Kabupaten Blora	V		PEMKAB	
20.	Perusahaan Perseroan Daerah Blora Patra Energi	Perubahan nomenklatur dan ketentuan sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD terhadap Perda Kab. Blora Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pendirian PT. Blora Patra Energi	V		PEMKAB	
21.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Blora Tahun 2011 - 2031	Perubahan beberapa ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Blora Tahun 2011 - 2031 untuk menyesuaikan perkembangan dan kondisi wilayah		V	PEMKAB	
22.	Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan penanganan penyandang masalah Kesejahteraan sosial meliputi PMKS dan PSKS	V		PEMKAB	
23.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu untuk mengantisipasi risiko bencana kebakaran yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.	V		PEMKAB	
24.	Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame	Penyesuaian Pasal yang memuat ketentuan pidana untuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pidana		V	PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
25.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	Penyesuaian terhadap penunjukan pasal yang tidak relevan		V	PEMKAB	
26.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Perubahan dalam rangka mencabut ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan		V	PEMKAB	
27.	Sistem Inovasi Daerah	Merupakan amanat dari Pasal 20 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	V		PEMKAB	
28.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora	Merupakan amanat Pasal 10-11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Penyusunan Rencana Pembangunan ini mengacu pada Permen Perindustrian Nomor 110/M-IND/per/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	V		PEMKAB	
29.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Regulasi mengenai Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan penjualan produksi usaha daerah berupa semen beku (<i>straw</i>) dan benih ikan	V		PEMKAB	
30.	Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Perubahan dalam rangka penambahan objek retribusi pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan hewan		V	PEMKAB	
31.	Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penambahan obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pelayanan laboratorium lingkungan yang dipungut berdasarkan Penjelasan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
32.	Kerjasama Desa	Mengatur ketentuan mengenai kerjasama Desa sesuai amanat Pasal 35 Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa dan Pasal 149 PP Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	V		PEMKAB	
33.	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Mengatur regulasi terkait pelaksanaan pembangunan sebagai pelaksanaan atas amanat Pasal 84 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	V		PEMKAB	
34.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Amerta" Kabupaten Blora	Perubahan nomenklatur dan ketentuan sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Blora Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Blora	V		PEMKAB	

B. Ranperda Komulasi Terbuka

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Akibat Putusan Mahkamah Agung	Komulasi terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	PEMKAB	
2.	Penataan Kecamatan / Penataan Desa	Komulasi terbuka penataan kecamatan / desa	PEMKAB	
3.	APBD	Komulasi terbuka APBD, APBD Perubahan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	PEMKAB	

